



PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

2025-2030

RANCANGAN AKHIR

RENSTRA

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

✉ dinasp3ap2kb.tanjabbarkab@gmail.com

🌐 www.reallygreatsite.com

KATA PENGANTAR

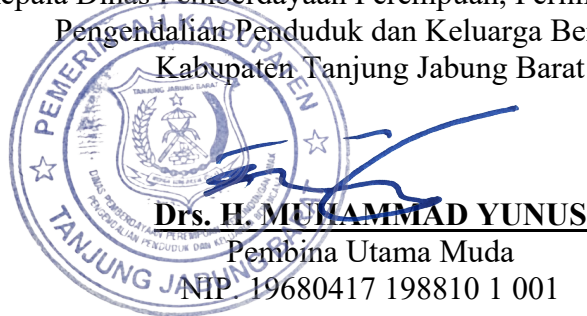
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) yang telah kami susun ini masih belum sempurna sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan Renstra ini, selanjutnya kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. H. MUHAMMAD YUNUS
Pembina Utama Muda
NIP. 19680417 198810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	65
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	65
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi/ Kab/Kota	68
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	72
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan	73
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Prioritas Daerah	74
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029	129
4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025 – 2029	130
BAB VIII PENUTUP	132
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan berdasarkan Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Perbup No. 25 tahun 2021).

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan yang harus tersedia dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi dan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dan yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 serta mengacu pada dokumen perencanaan provinsi maupun nasional.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggambarkan pelayanan perangkat daerah dan pengembangannya serta tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dan bagaimana mencapainya serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Visi dan Misi Bupati terpilih periode Tahun 2025-2029, agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang

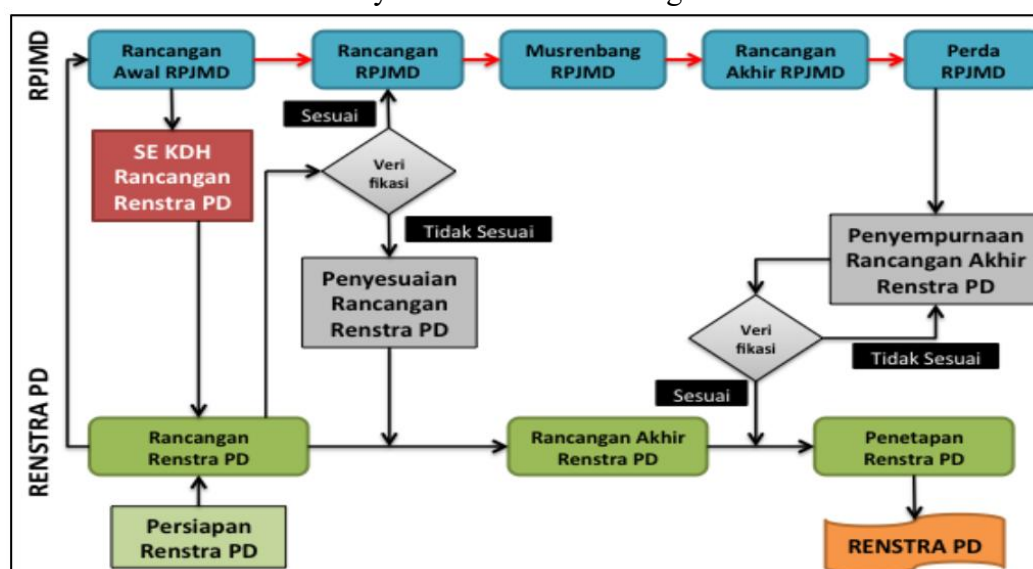
berkualitas. Renstra Perangkat Daerah ini akan menjadi pedoman dan bahan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 tahapan lima (5) tahun yang keempat dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025, yang disusun secara terintegrasi dan menyeluruh dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan aspirasi stakeholder pembangunan lainnya.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui beberapa tahapan proses penyusunan renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra
2. Penyusunan rancangan awal Renstra
3. Penyusunan rancangan Renstra
4. Perumusan renstra; dan
5. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alur dari tahapan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada gambar 1.1 :

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dengan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dan renstra Perangkat Daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama lima tahun.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Keluarga Berencana

- dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 732);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);

23. Peraturan Kepala BKKBN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Bara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah KabupatenTanjungJabung Barat Tahun 2018 Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 20);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 19);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Tahun 2025-2029, Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini adalah

1. Memberikan Arah tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Sebagai Penjabaran Visi dan Misi kepala Daerah kedalam dokumen kebijakan Perangkat Daerah agar dapat melaksanakan kegiatan pada urusan Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak pengendalian Penduduk dan KB
3. Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Renja DP3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Parameter untuk mengukur kinerja DP2KBP2 Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan keselarasan arah pembangunan yang terintegrasi dengan Asta Cita Nasional.
5. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3.2 Tujuan

Sejalan dengan maksud di atas, maka tujuan disusunnya RenstraDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan sasaran strategis dan program DP2KBP2 Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup DP2KBP2 Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

➤ **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

➤ **BAB II GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang;
 - a. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah;
 - b. Sumber daya perangkat daerah;
 - c. Kinerja pelayanan perangkat daerah;

- e. Kelompok sasaran serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, memuat
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. Isu Strategis

➤ **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029.

➤ **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029 melalui IKU Perangkat Daerah
6. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui IKK

➤ **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat tentang kesimpulan, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanagunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki acuan untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antar instansi dan / atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan visi misi dalam menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan, sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi.

Typelogi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Type A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (Empat) Bidang, Sekretariat terdiri atas 1 (satu) Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan Bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dikuasakan kepada daerah.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretaris bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas tiga Subbagian Umum Kepegawaian dan Jabatan fungsional Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas;

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum kepegawaian.
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya

2. BIDANG PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
- d. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- i. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- j. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- k. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- l. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- m. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- o. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- p. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan khusus anak meliputi pencegahan dan penanganan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya serta penanganan anak berhadapan dengan hukum dan anak berkebutuhan khusus;
- penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak partisipasi, kreatifitas, kegiatan budaya dan lingkungan serta pengembangan kabupaten layak anak;
- penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,

koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan; dan

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengendalian Penduduk , penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi advokasi dan penggerakan;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan, pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB dan PLKB) di bidang pengendalian penduduk dan KB.
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, bimbingan teknis, pemantauan serta evaluasi pengendalian penduduk dan system informasi keluarga;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- f. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengendalian penduduk; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

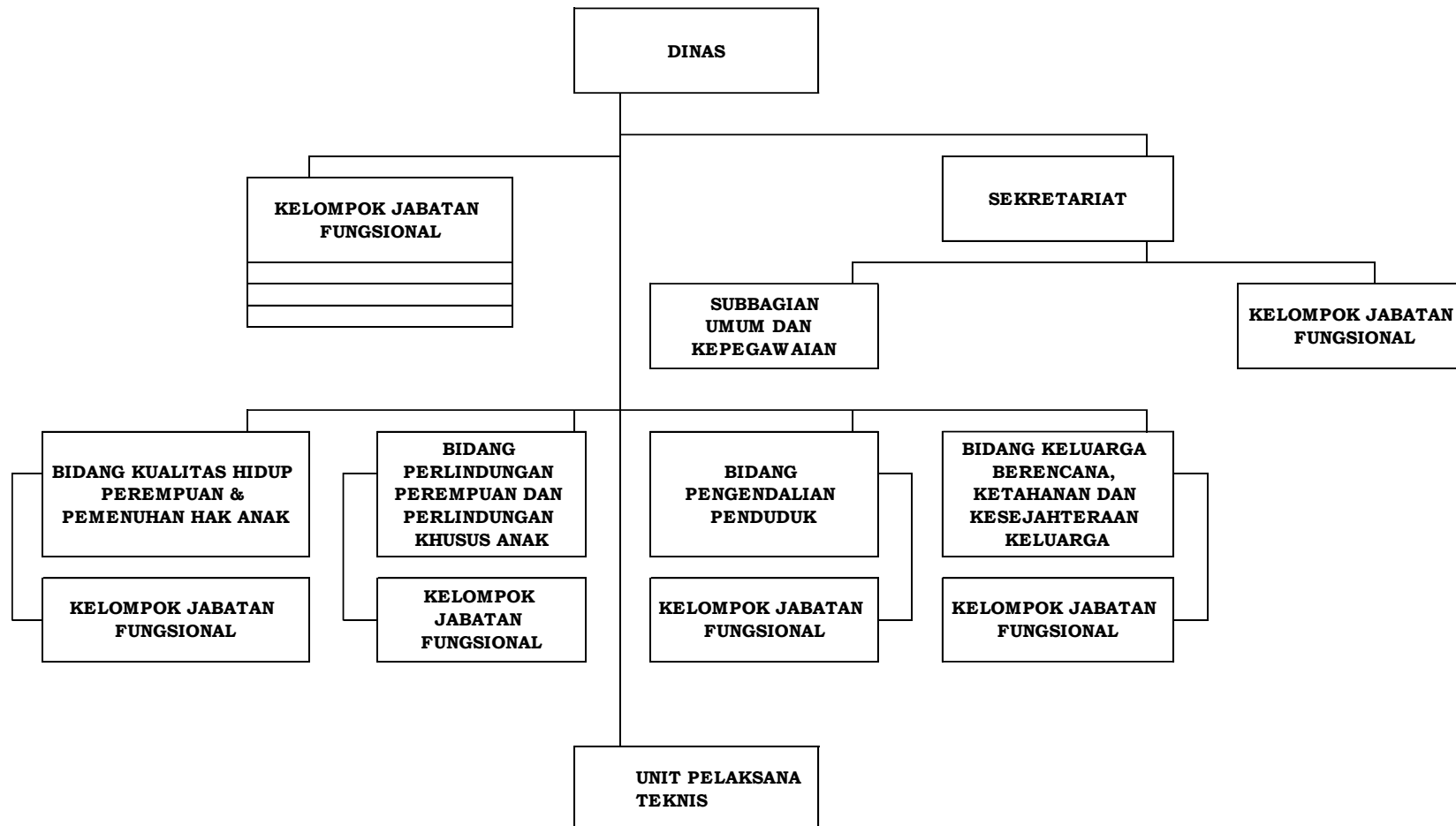
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas penyusunan perumusan dan pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program di bidang keluarga

- berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB, pengayoman terhadap peserta KB, pengendalian KB baru dan pembinaan serta pengembangan kegiatan remaja dan kesehatan re-produksi;
 - c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber-KB;
 - d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan ketahanan keluarga, pembinaan pengelolaan kelompok UPPKS, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina lansia dan bina lingkungan keluarga;
 - e. penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi di Daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk jelasnya Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dapat dilihat bagan di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
(Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023)



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung dengan Sumber Daya Manusia sampai dengan kondisi per 31 Desember 2024 berjumlah 48 orang terdiri dari 28 orang ASN (laki-laki 11 orang dan perempuan 17 orang), dan Non ASN berjumlah 20 orang (laki-laki 9 orang dan perempuan 11 orang). Dari jumlah Sumber Daya ASN dan Non ASN yang ada berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

Tingkat Pendidikan		ASN		NON ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	SLTP Sederajat	-	-	-	-	-
2.	SLTA Sederajat	3	5	5	2	15
3.	D1	-	-	1	-	1
4.	D3	1	-	1	-	2
5.	D4	-	-	1	1	2
4.	S1	6	10	3	6	25
5.	S2	1	2	-	-	3
6.	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		11	17	11	9	48

Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2024

Kemudian dari jumlah Sumber Daya ASN sebanyak 28 orang berdasarkan golongan dapat dilihat sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan II	2	-	2
2.	Golongan III	6	11	17
3.	Golongan IV	3	6	9
Jumlah		11	17	28

Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2024

Dari jumlah dan kondisi SDM yang ada saat ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih sangat membutuhkan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas. Karena jumlah ASN yang ada belum sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisa jabatan. Kemudian untuk menjalankan tugas lini lapangan di desa/kelurahan/kecamatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibantu oleh Petugas Lapangan KB(PLKB) berjumlah 51 orang yang terdiri dari PLKB ASN berjumlah 9 orang , PLKB P3K berjumlah 20 orang PLKB Non ASN/Motivator berjumlah 20 orang dengan wilayah kerja 13 Kecamatan, 134 desa/kelurahan. Sehingga sangat dibutuhkan penambahan PLKB Non ASN dalam rangka pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana, karena idealnya rasio PKB/PLKB 1 orang 1 desa/kelurahan, artinya masih dibutuhkan sebanyak 83 PLKB Non PNS yang mempunyai kapasitas dan kualitas SDM.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan tugas dan fungsi, memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Untuk lebih jelasnya jumlah dan kondisi sarana dan prasarana secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
I	Tanah	16	-	16
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	-	2
2	Gedung Balai Penyuluh	14	-	14
3	Gudang Alokasi	1	-	1
II	Peralatan dan Mesin	20	20	40
4	Alat-Alat Angkut Roda 4	4	2	6

	Kendaraan Dinas Eselon II	1	-	1
	Kendaraan Dinas operasional	2	2	4
	Kendaraan Mobil Perlindungan	1	-	1
5	Kendaraan Dinas Roda 2	16	18	34
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	62	37	99
	Komputer	26	11	37
	Laptop	8	5	13
	Printer	28	21	49
5	Alat Studio dan Komunikasi dan Pemancar Komunikasi	32	-	27
	CCTV	5	-	5
	Power Mixer	1	-	1
	Faksimile	2	-	3
	Smartphone	1	-	1
III	Bangunan dan Gedung	15	-	15
1	Bangunan Gedung Kantor	2	-	2
2	Gedung Balai KB	13	-	13
	Jumlah Total	41	20	61

Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2024

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Urusan wajib non Pelayanan Dasar yaitu 1) urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Peningkatan kualitas keluarga, peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak anak dan pemberian informasi serta pendampingan bagi korban kekerasan terhadap anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A). Sedangkan urusan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana yaitu mengendalikan pertumbuhan penduduk, pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan memaksimalkan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan KB dengan harapan dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk menuju penduduk tumbuh seimbang serta terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun sumber daya manusia yang tangguh menuju generasi emas di masa yang akan datang.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel TC-23 sebagai berikut:

TC-23. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2021-2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

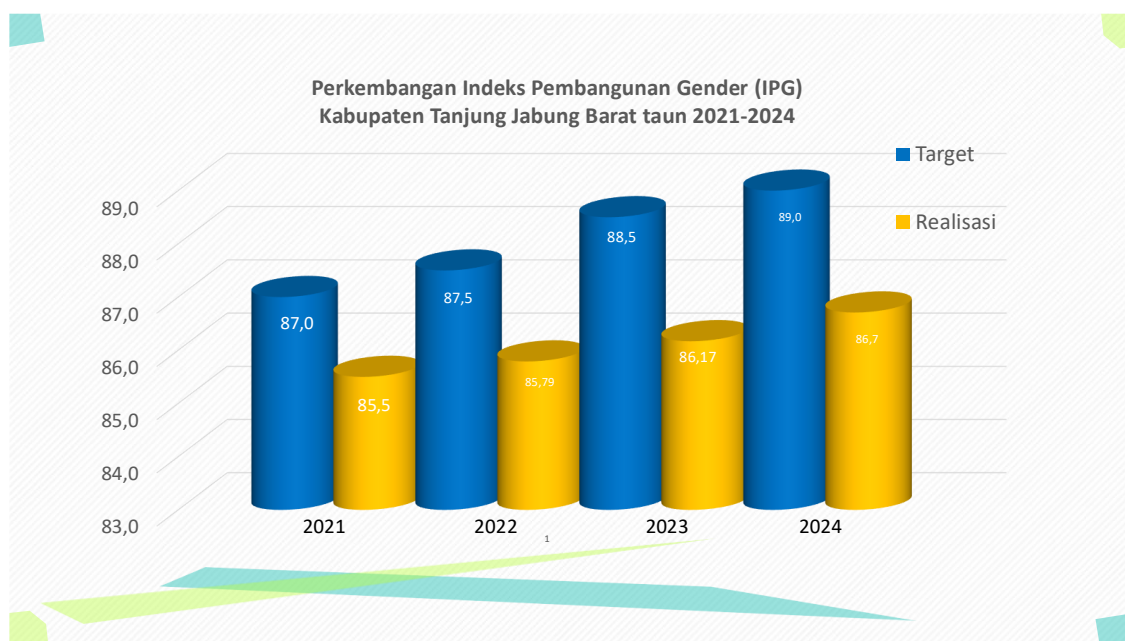
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Indikator Kinerja Utama /Tahun												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
					Target Renstra pada tahun -				Realisasi Renstra pada tahun -				Rasio Realisasi Renstra pada tahun -				
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Indek Pembangunan Gender (IPG)				87,0	87,5	88,5	89,0	85,5	85,79	86,17	86,7	98,28%	98,05%	97,37%	97,43%	90,0
2	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)				68,5	69,0	69,5	70,0	68,5	73,2	73,46	73,3	100,00%	106,09%	105,70%	104,70%	71,0
3	Rasio Kekerasan terhadap perempuan				15	12	9	6	0	9,06	23	33,3	0,00%	75,50%	255,56%	555,00%	1
4	Angka Perceraian				1,5	1,25	1,0	0,75	0	1,6	1,5	0,42	0,00%	128,00%	150,00%	56,00%	0,25
5	- Skor Kabupaten Layak Anak				599	645	699	745	599	575	601,5	753	100,00%	89,15%	86,05%	101,07%	845
6	Angka Total Kelahiran/ (Total Fertilty Rate/TFR) per WUS 15-49 tahun				2,55	2,50	2,45	2,40	2,37	2,37	2,39	2,39	92,94%	94,80%	97,55%	99,58%	2,3
7	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)				69	68	67	66	86,25%	34,85	50,8	50,8	1,25%	51,25%	75,82%	76,97%	64
8	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)				58,2	58,20	62,44	64,56	53,82	58,20	58,2	62,61	92,47%	100,00%	93,21%	96,98%	66,68
9	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan menikah usia 15-49 tahun				65,6	66,8	67,5	68,3	58,92	64	72,3	70,8	89,82%	95,81%	107,11%	103,66%	70,1
10	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/Unmeet-Need)				27,05	25,05	20,05	18,05	16	16	10,6	8	59,15%	63,87%	52,87%	44,32%	15,05

Berdasarkan Tabel di atas mengenai target dan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesenjangan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan alat ukur untuk melihat kualitas hidup perempuan dibandingkan dengan kualitas hidup laki-laki dengan faktor pembentuk alat ukur dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Penghitungan IPG dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Berikut grafik 2.1 perkembangan IPG Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

Grafik 2.1



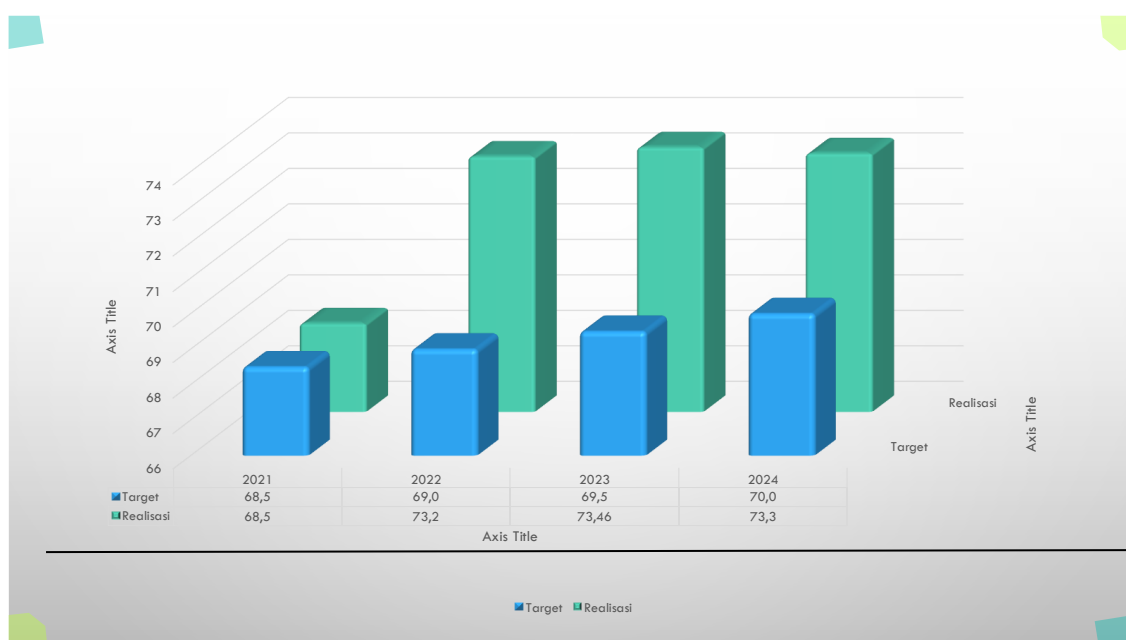
Sumber Data : BPS Tanjung Jabung Barat

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tanjung Jabung Barat berfluktuasi meningkat pada Tahun 2021-2024. Memperhatikan data selama kurun waktu empat tahun yaitu dari tahun 2021 – 2024 terjadi kenaikan IPG Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan point rata-rata 0,5 sampai dengan 1 point.

Peningkatan IPG di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih di bawah pencapaian IPG Provinsi Jambi. Meningkatnya capaian IPG Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuktikan bahwa pembentuk IPG yang berupa angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita mendukung kanaanikan dari IPG tersebut.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Peningkatan capaian IDG tertinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2019 yaitu 68,31 dan telah melebihi capaian IDG Provinsi Jambi, hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup tinggi. Berikut grafik 2.2 perkembangan capaian IDG Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

Grafik 2.2
PERKEMBANGAN IDG KAB.TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021 - 2024



Sumber Data: BPS Tanjung Jabung Barat

2. Perlindungan Perempuan

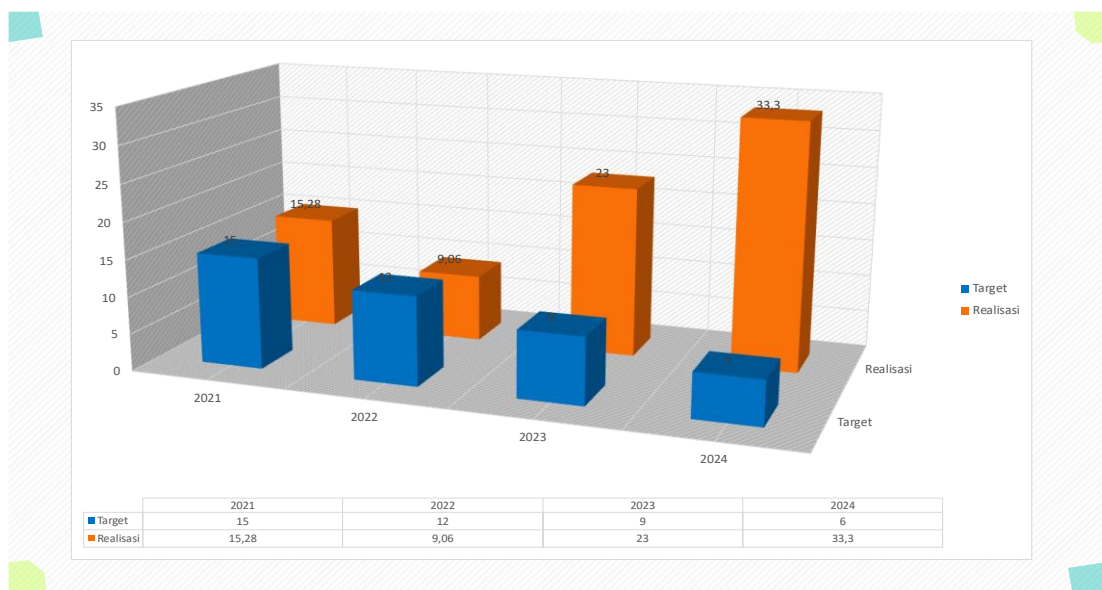
Capaian Kinerja pelayanan perlindungan perempuan memiliki rasio kecenderungan meningkat, hal ini dapat dilihat dari rasio kekerasan terhadap perempuan. Rasio kekerasan terhadap perempuan menggambarkan jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibandingkan dengan jumlah perempuan dalam suatu wilayah per 100.000. Angka ratio kekerasan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat fluktuatif, akan tetapi jika dibandingkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2021-2024 angka kekerasan yang dialami perempuan mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 10 point pada tahun 2024. Berdasarkan analisa yang terjadi di lapangan dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus kekerasan di Tanjung Jabung Barat antara lain;

1. Masyarakat telah menjalankan komitmen berani lapor atas tiap tindak kekerasan yang mereka alami.
2. Telah tersedia sarana pengaduan masyarakat secara online (APK. SINPAN) sehingga mempermudah akses masyarakat memberikan laporan.
3. Pemanfaatan Lingkungan masyarakat yang peduli terhadap kekerasan yang terjadi melalui kelompok masyarakat yang tergabung dalam P2TP2A Kab.Tanjung Jabung Barat.
4. Faktor Ekonomi dan kurangnya lahan pekerjaan dan efek negatif media sosial juga menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan di Kab. Tanjung Jabung Barat.
5. Pada beberapa kasus aktor penyebab yang paling sering terjadi adalah efek perceraian yang terjadi pada keluarga yang menyebabkan salah pola asuh anak, keterlibatan orangtua dan anak dalam komunikasi, serta menurunnya kualitas keluarga, sehingga orangtua dan anak yang tidak siap pada kondisi menjadi rusak dan kurang mendapatkan perlindungan.

Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat, dan tetap berupaya memenuhi kebutuhan SDM dan peningkatan penganggaran sehingga pelayanan fasilitasi terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan tidak dapat dilakukan secara optimal pasca kekerasan yang dialami korban. Berikut data perkembangan rasio kekerasan terhadap perempuan:

Grafik 2.3
Perkembangan Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan
Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024



Sumber data ; P3AP2KB Tanjung Jabung Barat

TABEL .2.4
DATA JUMLAH KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2020-2024

No	Jenis Kekerasan	Jumlah KDRT terhadap Perempuan dan Anak				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Fisik	7	5	4	4	17
2.	Seksual	1	5	1	4	2
3.	Psikis	1	6	2	2	5
4.	Penelantaran	0	0	2	0	2
5.	Lainnya	0	0	0	0	0
6	TPPO	0	0	0	0	0
JUMLAH		9	16	9	10	26

3. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Perlindungan dan pemenuhan Hak anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam fenomena di masyarakat yang sering terjadi adalah anak-anak dijadikan menjadi obyek eksploitasi oleh orang tuanya, perdagangan orang/trafiking anak dibawah umur, mendapat perlakuan kekerasan terhadap anak dan mendapat kesengsaraan sosial di lingkungannya. Untuk itu agar hak anak bisa terjamin maka anak seharusnya diberikan ruang untuk mengeksplorasi keinginannya tanpa rasa takut, karena hak fundamental anak itu terbagi menjadi empat yaitu (1) hak untuk bertahan hidup, (2) hak untuk mendapatkan perlindungan, (3) hak untuk tumbuh kembang dan (4) hak berpartisipasi. Sebagai kinerja pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat dilihat dari rasio kekerasan terhadap anak, status capaian kabupaten layak anak dan persentase status perkawinan usia anak.

Capaian Rasio kekerasan adalah jumlah korban terhadap anak dibagi dengan jumlah anak per 10.000 Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 s/d 2024 ratio kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari 2,97 Tahun 2021 menjadi 3,95 pada Tahun 2024, pada Tahun 2021 pernah terjadi penurunan rasio kekerasan menjadi 1,64 lalu kemudian meningkat kembali di tahun berikutnya, banyak faktor penyebab meningkatnya rasio kekerasan terhadap anak, salah satunya pola asuh orangtua terhadap anak, lingkungan sekolah dan bermain anak serta tingkat pengaruh media sosial. Sebagai data menunjukkan rasio kekerasan terhadap anak sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.5.
Rasio Kekerasan terhadap anak dari tahun 2021 - 2024
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Tahun	Jumlah Korban	Jumlah Anak	Ratio kekerasan terhadap Anak
1.	2021	31	104.216	2,97
2.	2022	17	103.785	1,64
3.	2023	39	104.500	3,73
4.	2024	41	103.732	3,95

Adapun jumlah korban kekerasan terhadap anak tersebut diatas adalah data kasus yang melapor ke UPPA Polres dan UPT PPA Kab.Tanjung Jabung Barat. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dibuat sebagai salah satu upaya meningkatkan pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak, diharapkan bahwa setiap Desa/Kelurahan harus memiliki Forum Anak Daerah (FAD) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terdiri dari minimal 10 orang aktivis, yang mana Forum Anak Daerah bertugas sebagai Pelopor (agen perubahan, terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang sehingga banyak yang terlibat untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi) dan pelapor (terlibat aktif menyampaikan pendapat/pandangan ketika mengalami atau melihat atau merasakan tidak terpenuhinya hak perlindungan anak di lingkungan masing-masing).Sementara untuk aktivis PATBM, diharapkan dapat melakukan upaya pencegahan dan respon cepat jika terjadi kekerasan terhadap anak diwilayahnya serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Status capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan dengan status Pratama pada tahun 2021 menjadi Madya Pada Tahun 2024 dengan skor nilai 601. Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Target madya untuk tahun 2024, namun hal ini belum tercapai. Untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung

Sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) harus terus dilakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait tugas dan tanggung jawab masing-masing pemangku jabatan dan OPD, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong stakeholder/ pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah-langkah dalam percepatan mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Meningkatkan komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Peningkatan pencapaian nilai skor indikator KLA perlu terus dilanjutkan dan dievaluasi untuk seluruh kluster yang menjadi penilaian , serta melakukan perbaikan dan pemenuhan kekurangan dokumen maupun sarana dan prasarana pada tiap kluster untuk mencapai hasil penilaian maksimal, sehingga Target Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menjadi Kabupaten Layak Anak dapat terpenuhi.

Suatu Kabupaten/ Kota dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) apabila Kabupaten dimaksud memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk terpenuhinya hak-hak anak. Dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2018.

Status Perkawinan Usia Anak artinya Pernikahan usia dini yang berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan perempuan yang menikah usia dini berisiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, anemia saat hamil, resiko terkena pre Eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa premature, berat bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi

(Manuaba, 2009). Penyebab dari pernikahan dini di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain pendidikan rendah, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, seks bebas pada remaja dan pemahaman agama (BKKBN, 2011). Penelitian di Switzerland oleh Joar Svanemyr (2012) juga menyatakan ibu yang berusia 18 tahun memiliki resiko 35% hingga 55% untuk melahirkan bayi dengan berat bayi lahir rendah (BBLR) dibandingkan pada ibu yang berusia diatas 19 tahun. Angka kematian bayi 60% lebih tinggi pada ibu yang masih berusia di bawah 18 tahun. Dengan demikian hasil penelitian tersebut menunjukan resiko kematian yang di sebabkan oleh kehamilan pada perempuan pelaku pernikahan dini 4 kali lebih tinggi untuk remaja di bawah 16 tahun daripada wanita di atas 20 tahun.

Pada rentang waktu Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan Sosialisasi Perkawinan Usia Anak di 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Bram Itam, Kuala Betara, Tungkal Ulu, Merlung, Tebing Tinggi, Pengabuan, Tungkal Ilir, Senyerang dan Kecamatan Betara dengan jumlah peserta 340 orang yang terdiri dari aparat kecamatan, KUA, guru, PKK Kecamatan dan siswa/i SLTP/SMA/MAN, tokoh masyarakat, tokoh agama, forum anak kecamatan dan PLKB, dengan tujuan sosialisasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama orang tua, anak-anak dan pengambil kebijakan di kecamatan tentang dampak perkawinan usia dini terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat bahwa data perkawinan anak pada tahun 2021 berjumlah 232 orang Tahun 2022 sebanyak 196 orang dan tahun 2023 turun menjadi 82 orang, tetapi angka ini tetap lebih tinggi dari tahun 2019 yang hanya berjumlah 23 orang, tingginya angka perkawinan usia anak karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan akan diizinkan jika laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, dilakukan sosialisasi tentang dampak negatif dari perkawinan usia anak dan telah terbitnya Undang-Undang Perkawinan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisikan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal perkawinan bagi pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan telah

diterbitkannya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.

4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang tersebut pada Tabel TC. 23 seperti indeks Pembangunan keluarga mengalami peningkatan setiap tahun Pada Tahun 2021 I Bangga berada pada point 53,82, tahun 2022 mencapai poin 58,20, Tahun 2023 I Bangga tetap pada point 58,20 dan meningkat pada tahun 2024 mengalami peningkatan mencapai 62,61. Artinya selama kurun waktu 4 tahun terjadi Peningkatan pada Indeks Pembangunan Keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas keluarga, khususnya dalam hal ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. iBangga juga mencerminkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan di suatu wilayah. Indeks ini digunakan untuk mengklasifikasikan wilayah berdasarkan status pembangunan keluarga, yaitu tangguh, berkembang, atau rentan.

Konsep I Bangga adalah :

➤ **Ketentraman Keluarga:**

Mencakup dimensi seperti kualitas hubungan antar anggota keluarga, keamanan rumah tangga, dan lingkungan yang kondusif.

➤ **Kemandirian Keluarga:**

Meliputi aspek kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengelola keuangan, serta memiliki akses terhadap informasi dan sumber daya.

➤ **Kebahagiaan Keluarga:**

Berkaitan dengan interaksi positif antar anggota keluarga, partisipasi dalam kegiatan sosial, serta rasa aman dan nyaman dalam keluarga.

I-Bangga menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan program pembangunan keluarga. Hasil pengukuran iBangga dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga. Dengan iBangga, pembangunan keluarga dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu.

Selain Ibangga kinerja pelayanan pada Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana adalah Indikator TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total) Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini terkait dengan angka kelahiran. Angka kelahiran total (TFR) pada Tahun 2021 sebesar 2,37 dan pada Tahun 2022 angka kelahiran total ini hanya mencapai di angka 2,37, realisasi pada tahun 2023 adalah 2,39 dan tahun 2024 adalah 2,40. artinya capaian TFR ini juga sangat dipengaruhi tinggi/rendahnya capaian kesertaan ber KB atau persentase pemakaian kontrasepsi Pasangan Usia Subur(PUS) usia 15-49 Tahun. Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) meningkat hanya sebesar 11,88 % selama 4 tahun, dan persentase kebutuhan ber KB (Unmetneed) yang tidak terpenuhi masih sebesar 8%. Angka Kelahiran Remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) menurun yaitu 50,8 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya pengetahuan tentang resiko kehamilan, kegagalan menggunakan alat kontrasepsi atau tidak menggunakan alat kontrasepsi (kegagalan ini paling sering dijumpai pada jenis kontrasepsi pil dan suntik yang dapat disebabkan karena ketidak teraturan pengguna dalam mengkonsumsi kontrasepsi dan kedatangan pasien yang tidak sesuai dengan jadwal, menurunnya persentase penggunaan alat kontrasepsi adalah pada kelompok usia 40-49 tahun, hal ini karena adanya persepsi bahwa wanita pada masa usia tersebut sudah memasuki masa monopause yang kemungkinan lebih kecil untuk mengalami kehamilan. Karena hal tersebut adalah merupakan suatu permasalahan maka perlu lebih ditingkatkan oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) untuk memberikan konseling tentang penggunaan alat kontrasepsi kepada Pasangan Usia Subur.

Kinerja Keuangan dan Pengaanggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mengalami peningkatan tahun ke tahun, seiring dengan pencapaian kinerja pelayanan yang menjadi targey dan indikator program pada DP3AP2KB, Rasio anggaran dan realisasi tahun 2025-2029 cukup signifikan, untuk pencapaian kinerja pelayanan sangat ditentukan oleh dukungan ketersediaan pendanaan ataupun anggaran pelayanan dalam urusan wajib pemerintahan yaitu urusan Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk

dan keluarga berencana selama lima tahun (2025-2029) hal ini dapat digambarkan sebagaimana pada Tabel T.C.24 berikut:

**Tabel Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2024**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	482.395.842	5.108.107.210	5.179.798.298	7.829.910.465	462.807.986	4.569.615.623	4.945.834.724	7.504.730.209	95,94	89,46	95,48	95,85	9,22	0,08
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	15.000.000	48.746.000	111.794.400	-	15.000.000	48.745.800	111.694.400	-	100,00	100,00	99,91	3,29	0,89
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4.348.540.582	4.183.090.278	4.551.727.215	-	3.837.686.655	3.972.392.653	4.303.373.579	-	88,25	94,96	94,54	(0,25)	- 0,25
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	58.500.000	32.000.000	-	-	58.175.000	32.000.000	-	-	99,44	100,00	-	(0,45)	0,14
Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah	250.388.492	230.728.717	417.676.020	433.382.650	249.018.283	230.333.168	414.087.046	431.910.599	99,45	99,83	99,14	99,66	0,80	0,18
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	132.678.561	104.332.000	879.135.000	-	126.235.000	104.327.000	851.717.000	-	95,14	100,00	96,88	(0,17)	0,21
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.820.000	202.692.000	211.610.000	236.880.000	136.227.603	194.707.500	196.624.165	225.698.633	89,73	96,06	92,92	95,28	0,01	0,08
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.187.350	119.967.350	182.344.000	1.616.991.200	77.562.100	107.478.300	177.658.060	1.580.335.998	96,73	89,59	97,43	97,73	0,65	0,23
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	500.044.065	609.173.913	799.599.300	595.639.200	429.136.565	590.721.263	771.662.300	506.190.035	85,82	96,97	96,51	84,98	0,09	- 0,19
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab /Kota	14.960.608	44.820.120	70.000.000	37.920.000	14.960.608	43.595.870	65.535.000	36.485.000	100,00	97,27	93,62	96,22	0,25	0,04
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	479.649.607	544.354.023	679.649.300	529.469.200	408.742.107	530.025.623	666.137.300	448.015.035	85,22	97,37	98,01	84,62	0,26	0,12
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	5.433.850	19.999.770	49.950.000	28.250.000	5.433.850	17.099.770	39.990.000	21.690.000	100,00	85,50	80,06	76,78	2,78	0,14
Program Perlindungan Perempuan	-	54.055.400	110.038.100	468.231.200	-	49.024.850	107.558.000	350.146.451	-	90,69	97,75	74,78	-	0,31
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah/Kabupaten	-	54.055.400	-	115.500.000	-	49.024.850	-	100.468.000	-	90,69	-	86,99	-	-
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Daerah Kab/Kota	-	-	110.038.100	268.360.000	-	-	107.558.000	172.118.900	-	-	97,75	64,14	0,35	- 0,10
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah Kab/Kota	-	-	-	84.371.200	-	-	-	77.559.551	-	-	-	91,93	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	27.429.750	-	-	-	26.759.750	-	-	-	97,56	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	37.000.000	69.998.800	64.636.000	-	36.150.000	65.958.800	63.256.000	-	97,70	94,23	97,86	(0,29)	0,25
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	-	-	-	64.636.000	-	-	-	63.256.000	-	-	-	97,86	-	-
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	-	37.000.000	69.998.800	-	-	36.150.000	65.958.800	-	-	97,70	94,23	-	-	-
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	52.219.269	132.663.230	441.582.500	456.348.400	51.349.269	130.473.230	412.632.900	428.334.400	98,33	98,35	93,44	93,86	(0,21)	0,25
Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	22.050.744	109.164.480	417.912.400	164.889.600	21.350.744	107.174.480	392.502.800	149.139.600	96,83	98,18	93,92	90,45	(0,87)	0,41
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	30.168.525	23.498.750	23.670.100	291.458.800	29.998.525	23.298.750	20.130.100	279.194.800	99,44	99,15	85,04	95,79	12,62	2,97
Program Perlindungan Khusus Anak	-	90.744.140	115.369.000	506.557.000	-	89.264.140	114.815.000	411.621.980	-	98,37	99,52	81,26	2,34	0,25
Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	-	-	-	185.588.000	-	-	-	172.333.000	-	-	-	92,86	-	-
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	-	-	-	215.869.000	-	-	-	139.852.980	-	-	-	64,79	-	-
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/kota	-	90.744.140	115.369.000	105.100.000	-	89.264.140	114.815.000	99.436.000	-	98,37	99,52	94,61	-	-
Program Pengendalian Penduduk	31.439.875	185.553.719	452.134.000	284.144.000	31.439.875	152.877.569	305.539.901	282.965.000	100,00	82,39	67,58	99,59	(0,32)	0,25
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan pemerintah Daerah Kab/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	29.999.990	39.934.000	110.000.000	-	29.999.990	265.605.901	109.921.000	-	100,00	665,11	99,93	(0,25)	0,25

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Pemetaan Perkiraan Pengendalian penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	-	155.553.729	412.200.000	174.144.000	-	122.877.579	39.934.000	173.044.000	-	78,99	9,69	99,37	3,33	0,83
Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur NonFormal dan Informal	31.439.875	-	-	-	31.439.875	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.616.545.124	6.476.352.596	4.539.445.200	5.517.460.800	4.937.105.019	5.363.086.519	4.422.950.200	5.042.023.539	87,90	82,81	97,43	91,38	(0,20)	- 0,27
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya lokal	2.396.071.257	881.858.326	1.619.800.000	2.008.837.000	2.264.228.152	803.699.226	1.577.473.500	1.914.757.500	94,50	91,14	97,39	95,32	0,28	- 0,46
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	905.605.632	909.839.020	292.414.800	360.524.600	903.305.632	909.805.034	290.984.800	358.824.600	99,75	100,00	99,51	99,53	(0,69)	- 0,42
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	581.594.700	2.703.592.870	329.702.900	920.461.000	400.645.200	2.607.954.080	300.764.400	575.356.600	68,89	96,46	91,22	62,51	5,29	- 0,26
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	20.919.315	364.645.031	360.938.500	278.309.800	20.889.315	320.520.031	325.938.500	251.039.800	99,86	87,90	90,30	90,20	(0,46)	- 0,01
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.712.354.220	1.616.417.349	1.936.589.000	1.949.328.400	1.348.036.720	721.108.148	1.927.789.000	1.942.045.039	78,72	44,61	99,55	99,63	0,97	- 0,05
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.712.354.220	1.616.417.349	1.936.589.000	1.949.328.400	1.348.036.720	721.108.148	1.927.789.000	1.942.045.039	78,72	44,61	99,55	99,63	1,67	0,20

Jika dilihat anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun telah direncanakan pada Renstra Dinas P3AP2KB Periode 2025 - 2029, yang kemudian dituangkan dalam Renja dan disampaikan ke TAPD melalui Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan kemampuan anggaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan anggaran program dan kegiatan yang prioritas adalah sesuai dengan KUA-PPAS yang ditetapkan oleh TAPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rasio anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 cukup signifikan, untuk pencapaian kinerja pelayanan sangat ditentukan oleh dukungan ketersediaan pendanaan ataupun anggaran pelayanan dalam urusan wajib pemerintahan yaitu urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama lima tahun cukup baik, hanya saja ada beberapa kegiatan yang ada pada dokumen renstra tidak teranggarkan secara konsisten sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra), bahkan tidak teranggarkan karena anggaran daerah tidak memadai, kemudian anggaran pada program yang mendukung urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, jika diperhatikan indikator kinerjanya anggaran APBD sangatlah minim dibandingkan dengan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang anggaran kegiatannya didukung juga dengan dana APBN melalui DAK Fisik dan Non Fisik BOKB, sedangkan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baru mendapat bantuan DAK Non Fisik Kemnetrian PPPA pada tahun 2024 anggaran dipergunakan untuk operasional layanan di UPT PPA Kab.Tanjung Jabung Barat, dan tahun 2025 mendapat dukungan DAK Fisik PPPA untuk pemenuhan renovasi Gedung Pelayanan UPT PPA dan Rumah Perlindungan Sementara (RPS), hal ini akan terus diupayakan berkelanjutan untuk mendapatkan bantuan dana melalui APBD/DAK Kementrian PPPA. Ketersediaan Anggarn sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan dan rasio anggaran serta realisasi tahun 2025-2029.

Adapun program yang dilaksanakan dan rasio realisasi anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, rasio realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 86%, tahun 2022 sebesar 97% tahun 2023 sebesar 97% dan tahun 2024 sebesar 85%
2. Program Perlindungan Perempuan rasio realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 98% tahun 2022 sebesar 91% tahun 2023 sebesar 98% dan tahun 2024 sebesar 78%.
3. Program Peningkatan kualitas keluarga, rasio realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 0%, tahun 2022 sebesar 98%, tahun 2023 sebesar 94% dan tahun 2024 sebesar 98%
4. Program Pemenuhan Hak anak, rasio realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 0, tahun 2022 sebesar 98%, tahun 2023 sebesar 93% dan tahun 2024 sebesar 94%.
5. Program Perlindungan Khusus anak, rasio realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 0, tahun 2022 sebesar 98%, tahun 2023 sebesar 100% dan tahun 2024 sebesar 81%.
6. Program Pengendalian Penduduk, rasio realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 0, tahun 2022 sebesar 82%, tahun 2023 sebesar 0% dan tahun 2024 sebesar 100%.
7. Program Keluarga Berencana, rasio realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 0, tahun 2022 sebesar 96%, tahun 2023 sebesar 0% dan tahun 2024 sebesar 70%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kurun waktu lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Dalam urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menjadi tantangan antara lain:
 - Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan serta Kabupaten Layak Anak masih kurang.
 - Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
 - Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

- Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi di keluarga.
 - Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh masyarakat terutama meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan keluarga, perempuan dan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
 - Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai Kabupaten Layak Anak masih kurang.
 - Belum optimalnya keterlibatan kelurahan/desa dan kecamatan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta tumbuh kembang anak.
- b. Tantangan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang akan mendapatkan Bonus Demografi, dimana struktur penduduk menunjukkan ciri positif ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi kependudukan ini membuka peluang bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividen*). Dalam upaya untuk mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi secara optimal diperlukan strategi yang tepat, guna meningkatkan SDM sebagai modal pembangunan, serta diperlukan langkah-langkah penguatan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk sehingga pemanfaatan bonus demografi dapat lebih komprehensif.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak.

- Adanya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- Adanya kerjasama antara Kementerian PPPA dan Kementerian desa untuk melaksanakan tujuan SDG's Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- Adanya komitmen dari Kepala Daerah dan Kepala OPD untuk mengembangkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi Kabupaten Layak Anak
- Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait anak.
- Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB.
- Adanya Petugas Lapangan (PKB/PLKB), motivator dan Kader.
- Adanya komunitas pendidikan formal dan informal.

2.5 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada periode 2025-2029 adalah **“Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI.**

- **BERKUALITAS**, Sumber Daya Manusia berdaya saing, sehat dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi daerah.
- **EKONOMI MAJU**, meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- **RELIGIUS**, berlandaskan nilai-nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.
- **KOMPETETIF**, mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumberdaya unggulan daerah.
- **AMAN**, Suasana aman dan tertib dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

- **HARMONIS**, terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

Unsur Visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Berkualitas, yang berarti Perempuan, Anak atau Keluarga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan akan berkualitas serta memiliki kompetensi dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi yang mandiri dan mampu berperan serta dalam pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk mewujudkan Visi tersebut dijabarkan melalui Misi Pembangunan jangka menengah RPJMD yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak.
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis
3. Peningkatan Tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota.

Dari masing-masing Misi tersebut ditetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang akan dicapai dalam Periode 2025-2029, adapun tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|---|---|
| Misi 1, Tujuan 1 | : | Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berakhlak mulia, dengan Sasaran:
1.1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia; |
| Misi 2, Tujuan 2 | : | Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok, dengan Sasaran:
2.1.1 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat
2.1.2 Terjaganya kelestarian dan pengembangan budaya daerah |
| Misi 3, Tujuan 3 | : | Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan Sasaran:
3.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;
3.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik; |

3.1.3 Meningkatkan kinerja penanggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah

Misi 4, Tujuan 4 : Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan, dengan Sasaran sebagai berikut:

4.1.1 Pertumbuhan ekonomi kabupaten;

4.1.2 Terjaganya kelestarian lingkungan hidup

Misi 5, Tujuan 5 : Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota, dengan Sasaran:

5.1.1 Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat;

5.1.2 Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan

Sedangkan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Matrik Penjabaran yang selaras dengan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu dan Berakhlak.

Tujuan 1 : Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berakhlak mulia.

Sasaran 1.1.1.3 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Program Prioritas : Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, dengan Aksi Program sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak
4. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Prioritas : Peningkatan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Cerdas dan Berkualitas, dengan Aksi Program sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk;

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga(K/L) dan Renstra Provinsi

Telaah Rencana Strategis(Renstra) K/L dan Renstra Provinsi dilakukan dalam rangka untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara OPD daerah Kabupaten dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi (OPD terkait). Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BKKBN.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian PPPA RI DAN BKKBN

A. Telaahan Renstra Kementrian PPPA RI

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
Sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
Capaian sasaran ini di ukur dengan indikator kinerja utama : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
Sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut :
 - a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

1. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan ratio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
2. Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan di bagi jumlah perempuan di atas 18 tahun
- b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
 Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : persentase Kabupaten/Kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh perempuan (100%) korban kekerasan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergisitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 Sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan partisipasi dan sinergisitas lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan dan perlindungan anak
 Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : Persentase Partipasipasi Lembaga masyarakat
4. Meningkatnya perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus
 Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak
 Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama Tingkat Kabupaten/Kota Layak Anak
 - b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak.
 Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
 - Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar.

B. Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

BKKBN merupakan badan induk dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, oleh karena itu terdapat korelasi antara berbagai pokok-pokok bahasan dokumen dari kedua instansi pemerintahan tersebut. Secara hirarkis seluruh kebijakan yang terkait mengenai program dan kegiatan dari BKKBN akan diturunkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diharapkan adanya sinergitas antara BKKBN dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dapat memperkuat potensi untuk mencapai tujuan dalam urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Salah satu bentuk sinergitas kedua lembaga ini dapat digambarkan dengan tujuan dan sasaran BKKBN yang selanjutnya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diturunkan menjadi sasaran melalui program dan kegiatannya pada tataran daerah. Adapun tujuan dan sasaran BKKBN yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:
 - a. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS(15-49 tahun)
 - b. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama Persentase pemakaian kontrasepsi.

2. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- a. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
 - b. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS(15-49 tahun)
- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama, Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi dan persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS(15-49 tahun)

3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- a. Menurunnya Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun(ASFR 12-19 tahun)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator Kinerja utama yaitu Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 (ASFR 15-19 tahun)

4. Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektifitas dan Kependudukan dan KB

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- a. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama, Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

C. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dirumuskan Pemerintah Provinsi Jambi disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sejalan dalam upaya pencapaian sasaran jangka menengah pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi, maka arah kebijakan pembangunan dalam kewenangan pemerintahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, secara hirarkis program dan kegiatan dapat disinergikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Salah satu bentuk sinergitas kedua lembaga ini dapat digambarkan melalui program dan kegiatannya pada tataran daerah. Adapun program pembangunan terkait dengan pelayanan perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Capaian program ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Program Perlindungan Perempuan
Capaian program ini diukur dengan indikator kinerja persentase kekerasan terhadap perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Capaian program ini diukur dengan indikator kinerja Indeks kesetaraan dan keadilan Gender.
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Capaian program ini diukur dengan indikator kinerja persentase pengelolaan sistem data gender dan anak.
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Capaian program ini diukur dengan indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak
6. Program Perlindungan Khusus Anak
Capaian program ini diukur dengan indikator kinerja persentase kekerasan terhadap anak.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai perkembangan yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan letak geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pintu masuk Sijori dan MSGT berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial Budaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033, yang mana didalamnya di atur tentang pemanfaatan ruang sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik daerah. Tujuan penataan ruang antara lain:

1. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
2. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, Provinsi dan Daerah.
3. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan

4. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya
5. Terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat
6. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya,
7. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari Pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan selama lima tahun kedepan (2025-2029) tidak merencanakan kegiatan pembangunan fisik skala besar yang membutuhkan alokasi ruang secara khusus. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak memberikan pengaruh terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang merupakan tujuan ke-5 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masa datang.

Adapun isu strategis yang berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi dan kebijakan program/kegiatan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan disektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial.
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat
3. Angka perceraian yang meningkat setiap tahunnya.
4. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual dan penipuan
5. Pernikahan usia anak masih relative tinggi
6. Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun) masih tinggi di atas angka Provinsi.
7. Kebutuhan ber-KB yang belum terlayani (unmetneed).
8. Prevalensi stunting relative masih tinggi.
9. Bonus Demografi, proporsi penduduk usia produktif 15-64 tahun meningkat
10. Masih adanya angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (Age Spesifik Fertility Rate/ASFR dan Kehamilan yang tidak diinginkan.
11. Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga serta terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan anak

hingga kebahagiaan keluarga.

Dari Gambaran diatas maka dapat disimpulkan perumusan penyusunan isu strategis sebagaimana tergambar dalam tabel 2.1 berikut ini ;

TABEL 2.1 TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

POTENSI DAERAH YANG MENJADI	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KHLS YANG RELEVAN PERANGKAT	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN			ISU STRATEGIS PERANGKAT
(1)	(2)	(3)	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	(7)
Belum optimalnya Angka Penurunan Total Fertility Rate (TFR)	Belum optimalnya Pelayanan KB, hal tersebut dapat dilihat dari masih tingginya pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah usia 21 tahun	banyaknya PUS yang tidak ikut ber KB	Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih sangat lebar	Masih rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi sehingga banyak pernikahan di bawah umur	Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk Kab Tanjung Jabung Barat	Unmed Need masih tinggi
Masih Rendahnya Presentase perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	Masih tingginya Presentasi KB baru yang Unmet Need	Alasan kesehatan yaitu efek samping kegagalan KB	Pemahaman Masyarakat mengenai wanita yang tidak boleh Mengenyam Pendidikan Tinggi	Kehamilan 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat, Terlalu Banyak)	Ledakan Kelahiran Pasca Pandemi	KB MKJP masih rendah
	Belum Optimalnya Penggunaan MKJP KB pria di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Menikah usia muda	Masih adanya pemahaman wanita tidak bisa mengerjakan tugas laki-laki	Rendahnya upaya untuk memberdayakan keluarga guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas	Maraknya Pernikahan di bawah umur	Tingginya Stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	Masih Rendahnya upaya untuk memberdayakan keluarga guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas	Melahirkan Usia Muda	Salah Perempuan jika terjadi pelecehan seksual	Minim pengetahuan dan Edukasi Tumbuh Kembang Anak	Masih Tingginya Kehamilan usia muda (di bawah 20 Tahun)	Banyaknya Kasus Perempuan dan Anak
	Masih adanya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak terutama kasus kekerasan Anak		Perempuan tidak boleh bekerja setelah menikah			Banyaknya kasus pernikahan anak
	Gugus tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Desa belum optimal					
	Tingginya kasus perkawinan Anak					
	Kurangnya pemahaman Perencanaan, Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 pada misi 1 yaitu “Berkah dalam Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan kondisi sosial yang tenteran, tertib, mantap dan inovatif, maka tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah

“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berilmu dan Berakhlak”.

Penjabaran dan Sinergitas Visi Misi Bupati Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran

Sasaran merupakan rumusan kondisi untuk menggambarkan tercapainya tujuan yang merupakan hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil pelaksanaan program Perangkat Daerah. Adapun sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan Tahun 2025-2029 menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesenjangan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan.
3. Meningkatnya Kualitas Keluarga
4. Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak
5. Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk
6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)
7. Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT											
#NAME?	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berilmu dan Berahklak	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	72,36	75,24	81	82	83	84	85	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	83,63	83,81	84,81	85,00	86,20	87,50	87,50	
		Meningkatnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	86,51	86,90	87	87,25	87,50	87,75	88	
			Indeks Ketimpangan Gender (Indeks)	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,5	0,5	
			Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)	73,39	73,5	74	74,25	74,5	75	75,25	
		Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (%)	6	33	32	31	30	29	29	
		Meningkatnya Kualitas Keluarga	Angka Perceraian (Angka)	0,75	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,7	
		Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (Indeks)	62,97	63,47	63,97	64,47	64,97	65,47	66	
		Terkendalnya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total/TFR (anak per wanita 15-49 tahun) (Angka)	2,39	2,33	2,31	2,28	2,26	2,24	2,22	
			Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15 - 19 tahun (*)	28	28	27	26	25	24	24	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)	Angka Pemakaian Kontrasepsi /CPR bagi Perempuan menikah usia 15-49 tahun (persen) (Angka)	70,80	65,32	66,12	66,92	67,72	68,52	69,4	
			Cakupan PUS yang tidak terpenuhi (Unneed-Need) (Angka)	8,2	11,65	11,35	11,05	10,75	10,45	10,45	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga) (*)	64,56	62,70	62,80	62,90	63,00	63,10	63,20	

3.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan dan anak, mengendalikan reproduksi pertumbuhan penduduk, meningkatkan pembangunan keluarga dan kesehatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, inovasi, dan perbaikan kinerja pelayanan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah atau perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas layanan, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan.

Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut ;

1. Sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Pengarusutamaan Gender dalam seluruh proses pembangunan Daerah
 - Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Pelaksanaan kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
 - Pencegahan dan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu.
2. Sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - Meningkatkan kualitas layanan perlindungan khusus kepada perempuan

- Meningkatkan Pemahaman pemerintah, Aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan terhadap dan anak termasuk TPPO
 - Meningkatnya Kualitas layanan perlindungan khusus kepada Anak
 - Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus terhadap anak
3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Keluarga;
- Memberikan Pelatihan peningkatan kemampuan kemandirian ekonomi keluarga
 - Melaksanakan sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Sasaran Terkendalinya Kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi;
- Melakukan Pembinaan Upaya meningkatkan usia perkawinan ideal
 - Melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat tentang pelayanan KB, khususnya dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang
 - Melakukan Pembinaan guna memberikan kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) untuk Ber KB
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sinkronisasi serta pemanfaatan data/informasi kependudukan
5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR)
- Melakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang menjadi kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R, UPPKA)
 - Memberdayakan kelompok UPPKA dalam pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga.
 - Memberikan pelatihan TOT untuk Generasi muda sebagai Generasi Berencana (Genre) dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kualitas keluarga.

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), diperlukan suatu tahapan pembangunan yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Penahapan pembangunan ini merupakan bentuk konkret dari proses perencanaan jangka menengah yang memecah target-target strategis ke dalam prioritas pembangunan tahunan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih fokus dan terarah sesuai dengan kapasitas fiskal, kesiapan kelembagaan, serta dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang.

Setiap tahapan pembangunan disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan logis antara program dan kegiatan pada tahun berjalan dengan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode RENSTRA. Dengan demikian, proses pembangunan tidak dilakukan secara sporadis atau parsial, tetapi mengikuti alur kebijakan yang berkesinambungan dan integratif. Tahapan ini juga memberikan ruang untuk penyesuaian secara adaptif terhadap perubahan regulasi, kebijakan nasional/daerah, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan rencana.

Selain itu, penahapan pembangunan juga berfungsi sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan sebagai acuan dalam penganggaran berbasis kinerja. Dengan menentukan prioritas tahunan yang jelas dan realistis, instansi atau perangkat daerah dapat lebih mudah memantau dan mengevaluasi capaian kinerja setiap tahun, sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap proses pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui penahapan yang tepat, diharapkan seluruh proses pembangunan dapat mendorong pencapaian sasaran strategis secara efektif dan efisien, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Adapun tahapan tersebut sebagaimana tabel 3.4 sebagai berikut:

TABEL 3.4 PENAHAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kesetaraan gender dan Pemenuhan Hak Anak				
analisa dan Pengumpulan data kelembagaan pengarusutamaan gender	Pendampingan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender	Implementasi program PUG dan PHA	Pemantauan kemajuan Program PUG dan PHA	Evaluasi hasil akhir program PUG dan PHA
Identifikasi dan Pembentukan tim penyusun daerah untuk Pelembagaan pengarusutamaan gender	Pelaksanaan Pelatihan , Kampanye kesadaran dan program PUG dan PHA	Pengembangan kebijakan dan kapasitas kader/Tim di lapangan	Pemantauan kemajuan Program PUG dan PHA	Penyesuaian dan Pengembangan rencana Lanjutan Program PUG dan PHA
Perlindungan Perempuan dan Anak				
Identifikasi masalah dan analisis data Kasus Kekerasan pada perempuan dan Anak	Pengembangan strategi program perlindungan perempuan dan Anak yang efektif dan efisien	Pelatihan kader perlindungan anak dan petugas lapangan untuk meningkatkan kualitas layanan perlindungan perempuan dan Anak	Pemantauan Pelaksanaan Pelayanan perlindungan perempuan dan Anak	Evaluasi akhir program perlindungan perempuan dan anak
menetapkan kegiatan program perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dengan pelatihan kader pelindung tingkat desa / kelurahan, penyediaan layanan dukungan bagi korban kekerasan, dan kampanye kesadaran		Pemantauan Pelaksanaan Pelayanan perlindungan perempuan dan Anak	Pengembangan rencana lanjutan program perlindungan perempuan dan anak untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian program
Pengendalian Penduduk dan KB				
Penguatan tata kelola tim percepatan penurunan stunting (TPPS) hingga tingkat Desa	Meningkatkan aksesibilitas layanan KB, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KB, dan meningkatkan kualitas layanan KB	Penurunan Angka Pernikahan pasangan dini dan kehamilan resiko tinggi	Penguatan Peran keluarga, Tokoh Masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan stunting	Evaluasi Pelaksanaan Program
Integrasi Program sensitif dalam perencanaan dan penganggaran OPD	Implementasi program stunting	Pengembangan kapasitas kader dan petugas lapangan untuk meningkatkan kualitas layanan penurunan stunting	Konsolidasi program stunting dengan program lain yang terkait	Evaluasi akhir program stunting dan dampak program
Pemutakhiran Dashboard data keluarga beresiko stunting				

3.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat bahwa pencapaian target-target sasaran pembangunan adalah melalui arah kebijakan yang disajikan pada misi RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam rangka proses menuju terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana telah dikemukakan, maka arah kebijakan yang dilaksanakan adalah berdasar pada misi ke-1 RPJMD yaitu “Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif”, dengan arah kebijakan (1) Integrasi isu gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, (2) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, (3) Peningkatan Kapasitas SDM Perangkat daerah dalam perspektif gender.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 diuraikan dalam tabel 3.5 berikut ini:

TABEL 3.5 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA P3AP2KB

NO	OPERASIONALISASI NSPK		ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Anak	-	Integrasi Isu Gender kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	Kolaborasi dengan lembaga dan mitra stakeholder dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	
		-	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Daerah	Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang berfokus pada penguatan kelembagaan PUG, Penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG	
		-	Peningkatan Kapasitas SDM Perangkat Daerah dalam Perspektif Gender	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang	
		-	Penguatan Peran dan Fungsi lembaga PUG dan Perlindungan Anak	Pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	
		-	Pembentukan dan optimalisasi forum koordinasi lintas sektor	Peningkatan kapasitas aparatur da	
2	Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	-	Peningkatan Sistem Pelaporan dan pengaduan kekerasan yang mudah diakses dan responsif	Pemanfaatan Teknologi Informasi	
		-	Penguatan Layanan Terpadu bagi korban kekerasan	Peningkatan kapasitas aparatur dan layanan UPT PPA dengan Mitra Stake holder pelayanan	
		-	Peningkatan Kampanye dan edukasi publik tentang pencegahan kekerasan	Advokasi komunikasi informasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak	
3	Pengendalian Penduduk dan KB	-	Perluasan jangkauan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan optimalisasi fungsi puskesmas dan pustu sebagai pusat layanan kesehatan dasar	Meningkatkan Penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisien dan efektif menurunkan angka unmet need	
		-	Penguatan layanan promotif dan preventif di fasilitas kesehatan	Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, sekolah lansia untuk peningkatan kualitas keluarga	
				Meningkatkan kualitas kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKA) dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	

BAB IV

PROGRAM ,KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

4.1 Rumusan Program,Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu 2025-2029, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014. Dalam rangka untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan diimplentasikan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Rumusan program, Kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini;

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT							
- Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Anak - Meningkatnya Kemandirian Desa Secara Berkelanjutan - Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berilmu dan Berakhlak	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik		Nilai AKIP OPD (Angka)		
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)		
					Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan PD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Laporan Keuangan Tahunan OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.08.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Kartu Inventaris Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.08.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tingkat Kehadiran Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.08.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Cakupan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah BMD Penunjang Urusan OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	
					Indeks Ketimpangan Gender (Indeks)	Indeks Ketimpangan Gender (Indeks)	
					Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)	Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)	
					Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Jumlah Kelembagaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
					Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan yang Berperan/Berpartisipasi di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Rasio kekerasan terhadap perempuan (%)		
					Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapat Layanan Rujukan Lanjutan	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah Unit Layanan Pengaduan Kekerasan	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
					jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	2.08.03.2.03.0009 - Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Meningkatnya Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak			Angka Perceraian (Angka)		
					Jumlah keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga melalui KG	Persentase Keluarga Memperoleh Edukasi Kualitas Keluarga Per 1000 KK (%)	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
						Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah pusat pelayanan keluarga	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Orang)
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)		2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)		2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)		2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Profile Gender Kabupaten Tanjung Jabung	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	
					Indeks Perlindungan Anak (Indeks)		
					Persentase Pemenuhan Hak Anak yang Terpenuhi (%)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha yang dibina	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan penguatan dan pengembangan	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Jumlah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapat peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapat peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	2.08.07.2.01.0011 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
					jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	
					Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.07.2.03.0014 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
		Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk			Angka Kelahiran Total/TFR (anak per wanita 15-49 tahun) (Angka)		
					Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15 - 19 tahun (*)		
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk		Total Fertility Rate (TFR) (*)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15 - 19 tahun (*)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
			Jumlah Kebijakan (Perda/Perbup) yang mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
				Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
				Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
				Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
				Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
				Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	2.14.02.2.01.0016 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	
					Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	2.14.02.2.01.0017 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
					Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	
					Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01.0028 - Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01.0031 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01.0033 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah profil kependudukan yang update tingkat kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
					Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)	2.14.02.2.02.0010 - Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
					Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	2.14.02.2.02.0023 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	
					Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)			Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan menikah usia 15-49 tahun (persen) (Angka)		
					Cakupan PUS yang tidak terpenuhi (Unmet-Need) (Angka)		
			meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Frekuensi pelaksanaan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	2.14.03.2.01.0009 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan dalam penyuluhan dan penggerakan program KKBPK	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
				Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.03.2.03.0005 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	2.14.03.2.03.0010 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	2.14.03.2.03.0017 - Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	
				Persentase ormas/mitra kerja yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)			Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga) (*)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)		Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) yang mendapatkan pembinaan KKS (Ketahanan Keluarga Sejahtera)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)	2.14.04.2.01.0029 - Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	
					Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan yang mendapatkan pembinaan KKS	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) (laporan)	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) (laporan)	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, mempedomani program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang direncanakan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				10.381.475.893		10.232.209.850		9.980.571.100		10.284.281.100		9.984.281.100			
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.941.462.393		7.259.185.143		6.997.546.393		7.311.256.393		7.011.256.393			
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100	7.941.462.393	100	7.259.185.143	100	6.997.546.393	100	7.311.256.393	100	7.011.256.393	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				176.600.000		156.000.000		168.000.000		168.000.000		168.000.000			
Tersedianya Dokumen Perencanaan PD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	14	176.600.000	14	156.000.000	14	168.000.000	14	168.000.000	14	168.000.000			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4				
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				65.500.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	65.500.000	6	90.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000			
2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				43.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	14	43.000.000	14	50.000.000	14	50.000.000	14	50.000.000	14	50.000.000			
2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				68.100.000		16.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000			
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	68.100.000	4	16.000.000	4	18.000.000	4	18.000.000	4	18.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.316.656.368		4.228.086.368		4.248.976.368		4.249.976.368		4.249.976.368		
Laporan Keuangan Tahunan OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	5	5	4.316.656.368	6	4.228.086.368	6	4.248.976.368	6	4.249.976.368	6	4.249.976.368		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	31		33		33		33		33			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	15	15		15		15		15		15			
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.038.296.368		4.038.296.368		4.038.296.368		4.038.296.368		4.038.296.368		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	31	4.038.296.368	33	4.038.296.368	33	4.038.296.368	33	4.038.296.368	33	4.038.296.368		
2.08.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				242.360.000		119.790.000		130.680.000		131.680.000		131.680.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	15	15	242.360.000	15	119.790.000	15	130.680.000	15	131.680.000	15	131.680.000		
2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				36.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5	5	36.000.000	6	70.000.000	6	80.000.000	6	80.000.000	6	80.000.000		
2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				19.500.000		16.500.000		18.000.000		19.500.000		19.500.000		
Kartu Inventaris Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	6	19.500.000	6	16.500.000	6	18.000.000	6	19.500.000	6	19.500.000		
2.08.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				19.500.000		16.500.000		18.000.000		19.500.000		19.500.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	6	19.500.000	6	16.500.000	6	18.000.000	6	19.500.000	6	19.500.000		
2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				67.500.000		52.500.000,00		55.000.000		57.500.000		57.500.000		
Tingkat Kehadiran Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	3	67.500.000	3	52.500.000	3	55.000.000	3	57.500.000	3	57.500.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	46	77		50		50		50		50			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				42.500.000		27.500.000		30.000.000		32.500.000		32.500.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	46	77	42.500.000	50	27.500.000	50	30.000.000	50	32.500.000	50	32.500.000		
2.08.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000		
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				598.296.525		493.068.775		523.290.025		528.750.025		528.750.025		
Cakupan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	598.296.525	12	493.068.775	12	523.290.025	12	528.750.025	12	528.750.025		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	166		20		20		20		20			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	86	284		210		210		210		210			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	1		5		5		5		5			
2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.000.000		15.000.000		15.000.000		16.500.000		16.500.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	14.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	16.500.000	12	16.500.000		
2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				94.924.000		52.646.000		57.432.000		57.432.000		57.432.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	94.924.000	12	52.646.000	12	57.432.000	12	57.432.000	12	57.432.000		
2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				27.200.000		6.600.000		7.200.000		7.800.000		7.800.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	86	284	27.200.000	210	6.600.000	210	7.200.000	210	7.800.000	210	7.800.000		
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				60.952.525		24.722.775		27.198.025		27.198.025		27.198.025		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	166	60.952.525	20	24.722.775	20	27.198.025	20	27.198.025	20	27.198.025		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.320.000		3.600.000		3.960.000		4.320.000		4.320.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	1	4.320.000	5	3.600.000	5	3.960.000	5	4.320.000	5	4.320.000		
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				396.900.000		390.500.000		412.500.000		415.500.000		415.500.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	396.900.000	12	390.500.000	12	412.500.000	12	415.500.000	12	415.500.000		
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.320.879.500		642.302.000		592.302.000		592.302.000		592.302.000		
Jumlah BMD Penunjang Urusan OPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	4	1.320.879.500	6	642.302.000	6	592.302.000	6	592.302.000	6	592.302.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	20		20		20		20					
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	8		8		8		8					
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	12		6		6		6					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10		10		8		10		10			
2.08.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				818.793.500		180.876.000		180.876.000		180.876.000		180.876.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	12	818.793.500	6	180.876.000	6	180.876.000	6	180.876.000	6	180.876.000		
2.08.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				159.536.000		180.876.000		180.876.000		180.876.000		180.876.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	4	159.536.000	6	180.876.000	6	180.876.000	6	180.876.000	6	180.876.000		
2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				157.550.000		55.550.000		55.550.000		55.550.000		55.550.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	20	157.550.000	20	55.550.000	20	55.550.000	20	55.550.000	20	55.550.000		
2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				85.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	8	85.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		150.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10	100.000.000	10	150.000.000	8	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				507.730.000		512.750.000		534.000.000		535.250.000		535.250.000		
Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	507.730.000	12	512.750.000	12	534.000.000	12	535.250.000	12	535.250.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1					
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.250.000		2.750.000		3.000.000		3.250.000		3.250.000		
Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	3.250.000	1	2.750.000	1	3.000.000	1	3.250.000	1	3.250.000		
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				165.000.000		165.000.000		165.000.000		165.000.000		165.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	165.000.000	12	165.000.000	12	165.000.000	12	165.000.000	12	165.000.000		
2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				339.480.000		345.000.000		366.000.000		367.000.000		367.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	339.480.000	12	345.000.000	12	366.000.000	12	367.000.000	12	367.000.000		
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				934.300.000		1.157.978.000		857.978.000		1.159.978.000		859.978.000		
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	7	934.300.000	10	1.157.978.000	7	857.978.000	10	1.159.978.000	7	859.978.000		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9	17		17		17		17					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16		16		16		16					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	14		14		14		14					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				67.500.000		56.654.000		56.654.000		58.654.000		58.654.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	14	67.500.000	14	56.654.000	14	56.654.000	14	58.654.000	14	58.654.000		
2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.800.000		89.994.000		89.994.000		89.994.000		89.994.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16	91.800.000	16	89.994.000	16	89.994.000	16	89.994.000	16	89.994.000		
2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		11.330.000		11.330.000		11.330.000		11.330.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9	17	75.000.000	17	11.330.000	17	11.330.000	17	11.330.000	17	11.330.000		
2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				700.000.000		1.000.000.000		700.000.000		1.000.000.000		700.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	7	700.000.000	10	1.000.000.000	7	700.000.000	10	1.000.000.000	7	700.000.000		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				669.398.400		719.649.607		719.649.607		699.649.607		699.649.607		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	10	20	669.398.400	20	719.649.607	20	719.649.607	20	699.649.607	20	699.649.607	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	23,07	24		24,03		24,07		24,09		24,10			
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				135.000.000		140.000.000		140.000.000		120.000.000		120.000.000		
Jumlah Kelembagaan PUG	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	1	135.000.000	0	140.000.000	1	140.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	15		15		15		15		15			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	15		1		0		1		1			
	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	0	0		1		1		0		0			
2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				20.000.000		30.000.000		-		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	15	20.000.000	1	30.000.000	0	-	1	30.000.000	1	30.000.000		
2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				-		50.000.000		50.000.000		-		-		
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	0	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	0	-	0	-		
2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				40.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	15	40.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000		
2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				75.000.000		-		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	1	75.000.000	0	-	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				484.398.400		529.649.607		529.649.607		529.649.607		529.649.607		
Jumlah Perempuan yang Berperan/Berpartisipasi di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	4	4	484.398.400	4	529.649.607	4	529.649.607	4	529.649.607	4	529.649.607		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	0	0		4		4		4		4			
2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				-		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	0	0	-	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000		
2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				484.398.400		479.649.607		479.649.607		479.649.607		479.649.607		
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	4	4	484.398.400	4	479.649.607	4	479.649.607	4	479.649.607	4	479.649.607		
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	5	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	5	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				348.000.000		535.000.000		535.000.000		535.000.000		535.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	348.000.000	100	535.000.000	100	535.000.000	100	535.000.000	100	535.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGA N ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				102.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	0	40	102.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000		
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				102.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tertaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	0	40	102.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000		
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapat Layanan Rujukan Lanjutan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2	20	195.000.000	20	195.000.000	20	195.000.000	20	195.000.000	20	195.000.000		
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2	10		10		10		10					
	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	5	10		10		10		10					
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	45	20		20		20		20					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	5	20			20	20		20		20			
2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	5	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000		
2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000		
2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	5	20	45.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000		
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	45	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000		
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000		
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				51.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		
Jumlah Unit Layanan Pengaduan Kekerasan	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	5	5	51.000.000	5	190.000.000	5	190.000.000	5	190.000.000	5	190.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	45	30		30		30		30		30			
	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	0		30		30		30		30			
2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				-		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	0	-	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000		
2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	45	30	1.000.000	30	70.000.000	30	70.000.000	30	70.000.000	30	70.000.000		
2.08.03.2.03.0009 - Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	5	5	50.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				51.000.000		131.000.000		131.000.000		131.000.000		131.000.000		
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Keluarga Memperoleh Edukasi Kualitas Keluarga Per 1000 KK (%)	0	20	51.000.000	20	131.000.000	20	131.000.000	20	131.000.000	20	131.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga melalui KG	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	30	-	30	80.000.000	30	80.000.000	30	80.000.000	30	80.000.000		
2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kolaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.				-		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	30	-	30	80.000.000	30	80.000.000	30	80.000.000,00	30	80.000.000		
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				51.000.000		51.000.000		51.000.000		51.000.000		51.000.000		
Jumlah pusat pelayanan keluarga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	5	51.000.000	5	51.000.000	5	51.000.000	5	51.000.000	5	51.000.000		
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	30	5		5		5		5		5			
2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000		
2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	30	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				1.000.000,00		31.000.000,00		31.000.000		31.000.000		31.000.000		
meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	16	100	1.000.000	100	31.000.000	100	31.000.000	100	31.000.000	100	31.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGA N ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		
Profile Gender Kabupaten Tanjung Jabung	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	0	30	1.000.000	30	31.000.000	30	31.000.000	30	31.000.000	30	31.000.000		
	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				-		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	0	1	-	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	0	30	1.000.000	30	1.000.000	30	1.000.000	30	1.000.000	30	1.000.000		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				414.240.000		600.000.000		610.000.000		620.000.000		620.000.000		
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase Pemenuhan Hak Anak yang Terpenuhi (%)	35	43	414.240.000	46	600.000.000	49	610.000.000	53	620.000.000	53	620.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGA N ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				264.240.000		450.000.000		460.000.000		470.000.000		470.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha yang dibina	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	264.240.000	1	450.000.000	1	460.000.000	1	470.000.000	1	470.000.000		
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	45	40		55		60		65		65			
	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	5	5		5		5		5		5			
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				130.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		170.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	45	40	130.000.000	55	150.000.000	60	160.000.000	65	170.000.000,00	65	170.000.000		
2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				134.240.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	5	5	134.240.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				-		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan penguatan dan pengembangan	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	6.000	6.000	150.000.000	6.000	150.000.000	6.000	150.000.000	6.000	150.000.000	6.000	150.000.000		
	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	1		1		1		1					
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	20	20		20		20		20					
2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	6.000	6.000	50.000.000	6.000	50.000.000	6.000	50.000.000	6.000	50.000.000,00	6.000	50.000.000		
2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	20	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				956.375.100		956.375.100		956.375.100		956.375.100		956.375.100		
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	15	35	956.375.100	40	956.375.100	45	956.375.100	50	956.375.100	50	956.375.100	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGA N ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				320.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000		
Jumlah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	0	1	320.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000		
	Jumlah kebijakan pencegahan KIA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KIA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	0	50		50		50		50		50			
	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	0	15		15		15		15		15			
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	0	1		1		1		1		1			
2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	0	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkat Kab/Kota (Kegiatan)	0	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000		
2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIA Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KIA Kewenangan Kabupaten/Kota				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KIA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KIA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	0	50	80.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000		
2.08.07.2.01.0011 - Penyusunan kebijakan pencegahan KIA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Penyusunan kebijakan pencegahan KIA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KIA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	0	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				346.375.100		346.375.100		346.375.100		346.375.100		346.375.100		
Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	19	30	346.375.100	30	346.375.100	30	346.375.100	30	346.375.100	30	346.375.100		
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	8	10		10		10		10		10			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	10	30		30		30		30		30			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	8	30		30		30		30					
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	12	10		10		10		10					
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				102.935.100		102.935.100		102.935.100		102.935.100		102.935.100		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	30	30	102.935.100	30	102.935.100	30	102.935.100	30	102.935.100	30	102.935.100		
2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	19	30	60.000.000	30	60.000.000	30	60.000.000	30	60.000.000	30	60.000.000		
2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	8	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000		
2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				38.440.000		38.440.000		38.440.000		38.440.000		38.440.000		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	8	10	38.440.000,00	10	38.440.000	10	38.440.000	10	38.440.000	10	38.440.000		
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	10	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		
Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	12	10	55.000.000	10	55.000.000	10	55.000.000	10	55.000.000	10	55.000.000		
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				290.000.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000		
Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	19	290.000.000	19	290.000.000	19	290.000.000	19	290.000.000	19	290.000.000		
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	30		30		30		30		30			
	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	19	21		21		21		21		21			
	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2	15		15		15		15		15			
2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	19	21	50.000.000	21	50.000.000	21	50.000.000	21	50.000.000	21	50.000.000		
2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000		
2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000		
2.08.07.2.03.0014 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	19	120.000.000	19	120.000.000	19	120.000.000	19	120.000.000	19	120.000.000		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.534.328.000		5.082.088.000		5.287.088.000		5.537.088.000		5.647.088.000		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				840.000.000		1.500.000.000		1.535.000.000		1.615.000.000		1.615.000.000		
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR) (*)	2,33	2,31	840.000.000	2,28	1.500.000.000	2,26	1.535.000.000	2,24	1.615.000.000	2,24	1.615.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGA N ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15 - 19 tahun (*)	28	27		26		25		24		24			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				400.000.000		740.000.000		750.000.000		830.000.000		830.000.000		
Jumlah Kebijakan (Perda/Perbup) yang mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	21	23	400.000.000	23	740.000.000	23	750.000.000	23	830.000.000	23	830.000.000		
	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		0		1		1			
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		0		0		0			
	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	0	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.2.01.0016 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				-		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	0	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.14.02.2.01.0017 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				-		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	0	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana				-		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	0	0	-	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000		
2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000		
2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				150.000.000		160.000.000		170.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	21	23	150.000.000	23	160.000.000	23	170.000.000	23	200.000.000	23	200.000.000		
2.14.02.2.01.0028 - Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				-		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	0	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				-		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikut Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	0	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.14.02.2.01.0031 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.14.02.2.01.0033 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				-		-		-		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				440.000.000		760.000.000		785.000.000		785.000.000		785.000.000		
Jumlah profil kependudukan yang update tingkat kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	0	13	440.000.000	13	760.000.000	13	785.000.000	13	785.000.000	13	785.000.000		
	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	0	13		13		13		13		13			
	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	0	21		134		134		134		134			
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	0	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.14.02.2.02.0010 - Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				-		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)	0	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				125.000.000		200.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	0	13	125.000.000	13	200.000.000	13	225.000.000	13	225.000.000	13	225.000.000		
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	0	13	130.000.000	13	130.000.000	13	130.000.000	13	130.000.000	13	130.000.000		
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		
2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana				-		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	0	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.2.02.0023 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen) Keluarga	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain				35.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		
Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	0	21	35.000.000	134	130.000.000	134	130.000.000	134	130.000.000	134	130.000.000		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1.961.908.000		2.799.668.000		2.919.668.000		3.039.668.000		3.099.668.000		
meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	25,20	66,12	1.961.908.000	66,92	2.799.668.000	67,72	2.919.668.000	68,52	3.039.668.000	69,4	3.099.668.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGA N ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	8,2	11,35		11,05		10,75		10,45		10,45			
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				490.000.000		490.000.000		490.000.000		490.000.000		490.000.000		
Frekuensi pelaksanaan advokasi pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	0	10	490.000.000	10	490.000.000	10	490.000.000	10	490.000.000	10	490.000.000		
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	21	21		21		21		21		21			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.14.03.2.01.0009 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000		
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000				
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000				
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000				
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000				
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000				
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000				
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	21	21	50.000.000	21	50.000.000	21	50.000.000	21	50.000.000	21	50.000.000				
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				250.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000,00		500.000.000				
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan dalam penyuluhan dan penggerakan program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	12	12	250.000.000	12	350.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000	12	500.000.000				
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	273	268				268				268					268
	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	0	0				10				10					10

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB				-		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	0	0	-	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000		
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	273	268	200.000.000	268	250.000.000	268	300.000.000	268	350.000.000	268	400.000.000		
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				720.908.000		740.908.000		760.908.000		780.908.000		790.908.000		
Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	0	15	720.908.000	20	740.908.000	25	760.908.000	30	780.908.000	35	790.908.000		
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)	0	1		1		1		1					
	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.218	1.022		1.022		1.022		1.022		1.022			
	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	0	10		10		10		10					
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				393.908.000		393.908.000		393.908.000		393.908.000		393.908.000		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.218	1.022	393.908.000	1.022	393.908.000	1.022	393.908.000	1.022	393.908.000	1.022	393.908.000		
2.14.03.2.03.0005 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				75.000.000		85.000.000		100.000.000		115.000.000		125.000.000		
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	0	15	75.000.000	20	85.000.000	25	100.000.000	30	115.000.000	35	125.000.000		
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		
2.14.03.2.03.0010 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				75.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		95.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	0	10	75.000.000	10	85.000.000	10	90.000.000	10	95.000.000	10	95.000.000		
2.14.03.2.03.0017 - Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				501.000.000		1.218.760.000		1.268.760.000		1.318.760.000		1.318.760.000		
Persentase ormas/mitra kerja yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	0	134	501.000.000	134	1.218.760.000	134	1.268.760.000	134	1.318.760.000	134	1.318.760.000		
	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	21	134		134		134		134		134			
	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	0	134		134		134		134		134			
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				1.000.000		718.760.000		718.760.000		718.760.000		718.760.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	0	134	1.000.000	134	718.760.000	134	718.760.000	134	718.760.000	134	718.760.000		
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				350.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		450.000.000		
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung)	21	134	350.000.000	134	350.000.000	134	400.000.000	134	450.000.000	134	450.000.000		
2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	0	134	150.000.000	134	150.000.000	134	150.000.000	134	150.000.000	134	150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				732.420.000		782.420.000		832.420.000		882.420.000		932.420.000		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	86	86,20	732.420.000	86,30	782.420.000	86,40	832.420.000	86,50	882.420.000	86,50	932.420.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGA N ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				730.420.000		780.420.000		830.420.000		880.420.000		930.420.000		
Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) yang mendapatkan pembinaan KKS (Ketahanan Keluarga Sejahtera)	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)	1	1	730.420.000	1	780.420.000	1	830.420.000	1	880.420.000	1	930.420.000		
	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	40	300		350		400		450		500			
	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	0	672		672		672		672		672			
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	31	20		20		20		20		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				100.000.000		100.000.000		100.000.000,00		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				129.420.000		129.420.000		129.420.000		129.420.000		129.420.000		
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	31	20	129.420.000	20	129.420.000	20	129.420.000	20	129.420.000	20	129.420.000		
2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	40	300	200.000.000	350	250.000.000	400	300.000.000	450	350.000.000	500	400.000.000		
2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	0	672	1.000.000	672	1.000.000	672	1.000.000	672	1.000.000	672	1.000.000		
2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya biaya operasional bagi Kader Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
2.14.04.2.01.0029 - Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan yang mendapatkan pembinaan KKS	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Perioritas Pemerintah daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, P3AP2KB menyusun sejumlah sub kegiatan prioritas yang diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis daerah dan mendorong peningkatan kinerja pembangunan di sektor unggulan. Sub kegiatan prioritas ini tidak hanya bersifat operasional, tetapi merupakan bagian integral dari strategi pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Pemilihan sub kegiatan prioritas dilakukan melalui proses identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta evaluasi terhadap capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya.

Setiap sub kegiatan yang masuk dalam kategori prioritas didesain untuk mendukung secara langsung terhadap pencegahan dan penanganan kasus perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pengendalian penduduk di Tanjung Jabung Barat, sub kegiatan prioritas diharapkan dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran yang berjalan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pendanaan.

Dengan pelaksanaan sub kegiatan prioritas secara konsisten dan berkesinambungan, diharapkan kinerja perangkat daerah tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sub kegiatan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam menjabarkan kebijakan kepala daerah ke dalam aksi nyata di lapangan, sesuai dengan pendekatan perencanaan berbasis hasil (*result-based planning*) dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Maka Sub kegiatan prioritas untuk program prioritas Pemerintah Daerah pada tabel 4.4 berikut:

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA				
1.	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
			2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
2.	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
3.	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	
4.	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	meningkatkan pemanfaatan data gender dan anak	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
6.	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
			2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
7.	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	
			2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.02.2.02.0010 - Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
			2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
			2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KET (05)
			2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
8.	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.03.2.03.0017 - Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	
9.	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

4.4 Indikator Kinerja Utama

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah ketersediaan indikator kinerja pelayanan yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam lima tahun mendatang adalah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja kunci Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel 4.5 berikut:

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT									
1	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (MCPR)	%	70,80	65,32	66,12	66,92	67,72	68,52	69,32	
2	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0	0,540	0,530	0,520	0,510	0,500	0,488	
3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/Unmeet-Need)	%	8,2	11,65	11,35	11,05	10,75	10,45	10,45	
4	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	73,39	73,5	74	74,25	74,5	75	75,25	
5	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	0	63,47	63,97	64,47	64,97	65,47	66,00	
6	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15 - 19 tahun	*	58	49	48	47	46	45	44	
7	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	86,51	86,90	87	87,25	87,50	87,75	88	
8	Angka Perceraian	Angka	2,1	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	
9	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	*	64,56	62,70	62,80	62,90	63,00	63,10	63,20	
10	Total Fertility Rate (TFR)	*	2,39	2,33	2,31	2,28	2,26	2,24	2,22	
11	Rasio kekerasan terhadap perempuan	%	33,3	33	32	31	30	29	28	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	komulatif	%	83	100	100	100	100	100	100	
3.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	komulatif	%	83,10	100	100	100	100	100	100	
4.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	positif	%	50	55	60	65	70	75	85	
5.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Indeks Ketimpangan Gender	negatif	Indeks	0,550	0,540	0,530	0,520	0,510	0,500	0,500	
7.	Indeks Pembangunan Gender	positif	Indeks	86,51	86,90	87	87,25	87,50	87,75	88	
8.	Indeks Pemberdayaan Gender	positif	Indeks	73,39	73,5	74	74,25	74,5	75	75,25	
9.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase Anak yang memperoleh layanan perlindungan Khusus	positif	%	15	30	35	40	45	50	55	
11.	Persentase Keluarga Memperoleh Edukasi Kualitas Keluarga Per 1000 KK	komulatif	%	20	20	20	20	20	20	20	
12.	Persentase layanan penanganan pengaduan kekerasan	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase OPD dan Desa melaksanakan PPRG	komulatif	%	10	10	10	10	10	10	10	
14.	Persentase OPD memiliki data pilah berdasarkan jenis kelamin	positif	%	60	60	70	80	90	100	100	
15.	Persentase Pemenuhan Hak Anak yang Terpenuhi	positif	%	35	40	43	46	49	53	55	
16.	Rasio KDRT	negatif	%	0,31	0,27	0,24	0,22	0,19	0,17	0,16	
17.	Indeks Perlindungan Anak	positif	Indeks	62,97	63,47	63,97	64,47	64,97	65,47	66	
18.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
19.	Cakupan Anggota BKB ber-KB	positif	%	90	90,10	90,20	90,30	90,40	90,50	90,60	
20.	Cakupan Anggota BKL ber-KB	positif	*	70	70,10	70,20	70,30	70,40	70,50	70,60	
21.	Cakupan Anggota BKR ber-KB	positif	%	80	80,10	80,20	80,30	80,40	80,50	80,60	
22.	Cakupan anggota Poktan yang ber-KB (BKB, BKR, BKL, UPPKA)	positif	%	88,47	88,57	88,67	88,77	88,87	88,97	89	
23.	Cakupan Anggota UPPKS ber-KB	positif	%	70	70,10	70,20	70,30	70,40	70,50	70,60	
24.	Cakupan Remaja dalam POKTAN PIK-R	positif	%	19	19,00	19,30	19,40	19,50	19,60	19,70	
25.	Indeks lansia berdaya	positif	%	0	51,5	52	52,5	53	53,5	54	
26.	indeks pengasuhan remaja	positif	*	0	57	58,5	59,5	60,5	61	61,5	
27.	Laju Pertumbuhan Penduduk	negatif	%	1,46	1,68	1,66	1,64	1,62	1,60	1,58	
28.	Persentase kampung keluarga berkualitas yang mandiri	positif	%	0	31,34	33,58	35,07	37,31	41,04	49,25	
29.	Persentase kehamilan tidak direncanakan	negatif	%	0	19	18,75	18,5	18	17,75	17,59	
30.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	positif	%	10,60	10,70	10,80	10,90	11	11,10	11,2	
31.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	komulatif	%	90	95	100	100	100	100	100	
32.	Persentase tingkat ketidak berlangsung pemakaian alat kontrasepsi (Drop out KB)	negatif	%	25,20	25,00	24,80	24,60	24,40	24,20	24	
33.	Total Fertility Rate (TFR)	negatif	*	2,39	2,33	2,31	2,28	2,26	2,24	2,22	
34.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (MCPR)	positif	%	70,80	65,32	66,12	66,92	67,72	68,52	69,32	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan, Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan indikatif, tentunya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini dapat dijadikan pedoman bagi segenap jajaran unit kerja dalam menentukan, menyusun, mengoperasionalkan program-program dan kegiatan prioritas pelayanan masyarakat serta Renstra ini transparan untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah di masa mendatang.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, diharapkan perencanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan dan bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kuala Tungkal, September 2025

KEPALA DINAS



Drs. H. MUHAMMAD YUNUS

Pembina Utama Muda

NIP. 19680417 198810 1 001